

BAB I

PENDAHULUAN

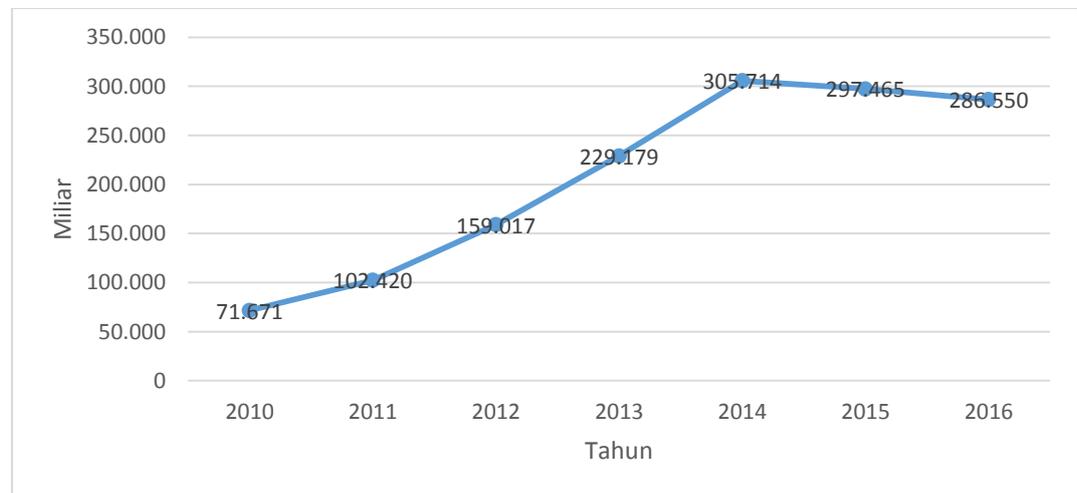
1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan, baik angka kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan. Tetapi, angka kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Di mana jumlah penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2017 mencapai 10,27 juta orang, sedangkan di pedesaan jumlah penduduk miskin mencapai 16,31 juta pada bulan September 2017. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan salah satunya diakibatkan rendahnya akses pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh bank sasarannya hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Hal itu di karenakan tujuan utama bank adalah untuk profit yang sebesar- besarnya dan rugi serendah-rendahnya (Tempo.co, 2017).

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan menengah ke bawah berdirilah lembaga keuangan mikro syariah, dengan nama institusi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT ini lebih memfokuskan pada masyarakat menengah ke bawah terutama dalam akses pembiayaan. BMT dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian yang ada di Indonesia di mana BMT mampu menjadi pondasi ekonomi yang kokoh ketika terjadi krisis ekonomi. BMT memberikan pelayanan dan pendampingan kepada usaha mikro untuk menumbuhkan perekonomian dari bawah (Republika.co.id, 2017).

Menurut Menteri Koperasi pertumbuhan BMT cukup signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp. 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Menteri Koperasi berharap BMT Indonesia bisa menjadi salah satu motor penggerak berkembangnya BMT/ KSPPS. Menkop juga mendorong agar kopontren dapat melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS/ UPPS Koperasi (Siaran Pers, 2016).

Keberadaan BMT di Indonesia telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun (Sakti, 2013). Dapat ditunjukkan dari sisi aset BMT dari Tahun 2010-2016 yang digambarkan dalam gambar 1.1



Gambar 1.1
Perkembangan Aset BMT di Indonesia Tahun 2010- 2016
 Sumber: Induk Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (2018)

Terlihat dari gambar 1.1 total aset BMT yang ada Indonesia cenderung meningkat tiap tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 hingga bulan Maret tahun 2016 mengalami penurunan. Perkembangan kinerja BMT mengalami penurunan ditandai dengan nilai pertumbuhan aset dan kewajiban jangka panjang.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk BMT berkembang sangat signifikan. Adapun perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun (Republika.co.id, 2017). BMT ini kegiatannya lebih menghususkan pembiayaan modal kerja untuk masyarakat yang mempunyai usaha menengah, kecil, mikro. Agar masyarakat tersebut lebih kreatif dan produktif dalam menjalankan usaha tersebut (Soemitra, 2009).

Berdasarkan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) jumlah BMT yang beroperasi di Indonesia semakin banyak. Namun dengan banyaknya BMT sekarang ini, belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini karena dalam perkembangannya BMT menghadapi berbagai

tantangan dan permasalahan yang timbul baik dari internal maupun eksternal. Berdirinya lembaga BMT yang ada di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat memperkuat keberadaan BMT ini, yang ada hanya sekedar keinginan besar untuk mendirikan BMT sebagai wujud syiar dalam Islam tanpa adanya didasari dengan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang professional. Hal ini akibatnya BMT yang muncul tersebut tidak berjalan lagi atau tumbuh sehingga BMT tersebut banyak yang mati (Muhibah, 2016).

Menurut Ascarya (2013) berdasarkan riset yang dilakukan selama periode 2007- 2011 terhadap 6 kelompok Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan jumlah responden sebanyak 19 unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tingkat efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) masing- masing berada pada kisaran 32% dan 29%. Masalah utamanya adalah tingginya biaya *overhead*, kemampuan menjaga likuiditas, rendahnya permintaan deposito, dan resiko inflasi. Berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga keuangan mikro syariah masih menghadapi efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah perhitungan yang didapatkan dari rasio antara proses *output* dan *input* Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Proses *output* meliputi pembiayaan, kredit, dan pendapatan lainnya (jasa), sedangkan untuk proses *input* meliputi tenaga kerja, aset, dan *funding* atau penadanaan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Ascarya (2013) bahwa permasalahan koperasi dan BMT mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadang menganggap bank sebagai satu- satunya lembaga keuangan, sehingga dana masyarakat terkonsentrasi di bank. Padahal, terdapat beragam lembaga keuangan terutama LKM yang hadir di masyarakat pada saat ini. Akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) saat ini masih bisa menghasilkan keuntungan meski didera *inefisiensi* dan sulitnya meraih dana murah.

Menurut Gampito (2008) keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung dengan manajemen professional yang memungkinkan BMT sustain dan berjalan dengan baik. Adapun beberapa penyebab tidak sustainnya BMT di Indonesia diantaranya adalah manajemen yang buruk, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang

tidak mampu bekerja secara professional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya (Ali & Ascarya, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi (2018) Ketua Gakopsyah menjelaskan bahwa kondisi secara umum BMT saat ini sedang menata ulang lembaganya. Maka dari itu BMT yang serius akan menata ulang kembali BMT sedangkan BMT yang tidak serius akan membubarkan BMT tersebut. Permasalahan umum yang mendasar dari BMT itu ketika mengelola BMT rasanya Bank jadi ingin memposisikan BMT sebagai Bank mini. Mengelola BMT rasa Bank ini seperti pelayanan bank, orang menyimpan bisa pinjam namun tidak mempunyai simpanan pokok itu merupakan kesalahan. Hingga saat ini masyarakat yang berkelebihan pinjaman ke BMT atau lembaga keuangan lainnya tinggi mencapai lima hingga enam dan itu mengakibatkan BMT menjadi sasaran “sampah” yang tidak laku di lembaga keuangan lain karena sudah meminjam kesekian kali.

Meminjam untuk utang yang lain, hal itu salah satunya yang membuat BMT rasanya Bank. Oleh sebab itu BMT- BMT dalam proses bisnisnya tidak menyadari hal itu. Sebagian besar masyarakat masih menyalah artikan bahwa BMT atau koperasi itu adalah Bank. Mayoritas operasional baitul maal dari BMT itu belum berjalan, belum semua masyarakat ingin menitipkan zakat, infaq, shadaqohnya melalui BMT. Jika hal itu sudah ada kemungkinan besar banyak yang bisa dilakukan oleh BMT.

Terkait efisiensi, *Standard Operating Procedure* (SOP), SUM ketika BMT tidak dikelola dengan kapasitas keilmuan yang cukup. Maka, BMT bukan menjadi lembaga simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi tetapi lembaga simpan pinjam yang seperti “alat seseorang” sebagai penyeter modal yang menjadi pengusaha simpan pinjam. Artinya, ketika modal hanya dari satu orang yang dominan maka namanya bukan simpan pinjam yang lain sebagai pelengkap. Hal tersebut yang terjadi dari sekian lembaga BMT yang proses BMT belum berjalan itu ada yang diketahui oleh Lutfi selaku ketua Gakopsyah. Untuk BMT Rabbani sendiri akan berubah dari simpan pinjam menjadi sektor rill karena pokok pembiayaan dalam BMT Rabbani sudah ditinggalkan.

Berdasarkan penelitian Ascarya dan Illiyyin (2013) mengungkapkan di tahun 2007-2009 BMT memiliki banyak kelemahan terutama pada faktor karyawan dan aset tetap. Namun, di akhir tahun 2012 kelemahan BMT bergeser pada faktor pembiayaan bank dan modal anggota. Pembiayaan bank masih menjadi sumber utama pendanaan karena BMT masih mengalami kesulitan dalam menggalang dana simpanan dari yang mayoritas umat miskin. Selain itu, BMT juga harus menjaga likuiditasnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terutama ketika mereka mengambil dana simpanannya pada masa-masa tertentu (tahun ajaran baru pendidikan dan bulan Ramadhan). Modal Anggota koperasi yang belum efisien juga menunjukkan tingkat SHU kepada anggota yang cukup besar.

Berdasarkan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa metode DEA menghasilkan tiga ukuran efisiensi, yaitu Efisiensi Teknis (*Technical Efficiency-TE*), Efisiensi Teknis Murni (*Pure Technical Efficiency-PTE*), dan Efisiensi Skala (*Scale Efficiency-SE*). Adapun TE adalah hasil perkalian dari PTE dan SE. PTE BMT mencapai 94,8 persen di tahun 2007 yang kemudian sedikit menurun di tahun 2008-2009 dan akhirnya meningkat terus di tahun 2010-2012 hingga mencapai 100 persen di tahun 2012. PTE Koperasi meningkat terus dari 88,8 persen di tahun 2007 hingga mencapai 100 persen di tahun 2010-2011, dan akhirnya menurun menjadi 94,9 persen di tahun 2012. SE BMT secara umum meningkat sedikit demi sedikit dari 93,5 persen di tahun 2007 menjadi 97,6 persen di tahun 2012, dan terlihat sedikit menurun di tahun 2009 (Ascarya & Illiyyin, 2013).

Scale Efficiency koperasi secara umum stabil dari 98,9 persen di tahun 2007 menjadi 99,3 persen di tahun 2012, dan terlihat menurun lebih banyak dibanding BMT di tahun 2009. TE BMT di tahun 2007-2009 mengalami stagnasi di sekitar 88 persen, namun kemudian meningkat terus di tahun 2010-2012 hingga mencapai 97,6 persen di tahun 2012. Kenaikan efisiensi TE BMT utamanya didukung oleh kenaikan PTE-nya. Sementara itu TE Koperasi meningkat terus dari 88 persen di tahun 2007 hingga mencapai 100 persen di tahun 2010 dan 2011. Namun demikian TE Koperasi menurun di tahun 2012 menjadi 94,2 persen. Naik turunnya TE koperasi merupakan kontribusi dari pergerakan PTE. Angka-angka

TE tersebut menunjukkan koperasi lebih efisien dari pada BMT di tahun-tahun awal, namun diakhir tahun 2012 BMT menjadi lebih efisien dibandingkan koperasi (Ascarya & Illiyyin, 2013).

Adapun penelitian menurut Atiqi (2014) secara historis sekitar tahun 1990 BMT tumbuh pesat dengan total sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Namun, sebagian besar BMT tidak bekerja dengan baik dan beberapa dari mereka telah runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan BMT tidak konsisten dengan pengembangan kualitas kinerjanya. Oleh karena itu, kinerja BMT ini perlu dievaluasi untuk mengetahui masalah dan *inefisiensi* penting terutama evaluasi efisiensi dan efektivitas BMT dalam rangka untuk menunjukkan kesehatan lembaga ini yang dapat efektif untuk manajemen kekayaan Islamnya.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat belas BMT terpilih sebagai sampel penelitian karena merupakan operasi BMT terbesar di provinsi termiskin. Sebagian besar BMT ini telah mapan di mana mereka telah beroperasi lebih dari lima tahun, memiliki aset lebih dari Rp 1 miliar dan telah melayani lebih dari 500 peminjam (orang miskin). Bahwa yang paling efisien BMT UGT Sidogiri adalah di Jawa Timur dan BMT Al Hikmah Bangsri di Jawa Tengah dengan skor 1 dicapai dalam setiap tahun dan setiap pengukuran efisiensi. Ini berarti bahwa mereka telah dioptimalkan masukan untuk mendapatkan output maksimum dengan mengharuskan modal dan aset tetap untuk menciptakan pendapatan yang optimal dan mengucurkan sebanyak pinjaman. Di sisi lain, BMT yang memiliki hasil yang kurang efisiensi adalah karena inefisiensi untuk mengoptimalkan masukan mereka. BMT Al-Anhar, misalnya, jumlah TE dan PTE sangat rendah disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan juga tidak adanya pendukung dana (dana pihak ketiga).

Adapun dalil dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 261 terkait pembentukan BMT yaitu dibawah ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al- Baqarah,02: 261)

Untuk mengukur kinerja tersebut dibutuhkan efisiensi. Efisiensi dibutuhkan bagi setiap perusahaan untuk melakukan sesuatu secara benar (*doing the thing right*). Efisiensi adalah perbandingan *output* dan *input* berhubungan dengan tercapainya *output* maksimum dengan sejumlah *input*. Jadi jika rasio *output input* besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi (Pasaribu, Bakce, & Dewi, 2016). Dengan memperhatikan alokasi *input* dan *output* yang ada, maka suatu kinerja dapat dianalisa dengan melihat untuk lebih jauh ketidakefisienannya.

Sehingga dalam hal ini BMT yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu BMT yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari BMT Dana Ukhuwah, BMT El Dana Manfaat, BMT Mustama, dan BMT Rabbani. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan baik dan lebih produktif perlu adanya pengukuran efisiensi. Dalam hal ini, penulis mengaplikasikan pengukuran efisiensi *input* beban operasional, total aset, dan dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan *output* pengukuran efisiensi yaitu SHU, pendapatan dan pembiayaan. Menurut beberapa jurnal *input* dari pengukuran efisiensi ada beban bagi hasil, biaya personalia, beban umum, administrasi, aset tetap, jumlah karyawan, simpanan, pembiayaan, dan modal anggota. Sedangkan untuk *output* dari pengukuran efisiensi diantaranya ada dana pihak ketiga (DPK), jumlah pembiayaan yang disalurkan, pendapatan laba usaha, pendapatan operasional.

Berdasarkan fenomena di atas muncul pemikiran penulis untuk membahas lebih lanjut permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penulisan Skripsi dengan judul “Efisiensi Lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* di Kabupaten Bandung Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. *Baitul Maal wat Tamwil* dalam perkembangannya menghadapi tantangan dan permasalahan tingginya biaya *overhead*, kemampuan menjaga likuiditas, rendahnya permintaan deposito, dan resiko inflasi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan sulitnya meraih dana murah (Ascarya, 2013).

2. Tidak sustainnnya *Baitul Maal wat Tamwil* yang ada di Indonesia adalah manajemen yang buruk, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang tidak mampu bekerja secara profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya (Sumiyanto, 2008).
3. Efisiensi kinerja BMT harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan para praktisi BMT khususnya, karena untuk meningkatkan kualitas kinerja BMT yang ada di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia (Muhibah, 2016).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa yang menyebabkan *inefisiensi Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada di Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang ini adalah ingin mengetahui tingkat efisiensi BMT yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu ingin mengetahui yang menyebabkan *inefisiensi* BMT di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam lebih khusus lagi dengan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi masukan serta informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan seperti bagi pihak BMT sendiri sebagai acuan bagi BMT untuk memperhatikan tingkat efisiensinya.